BAB I

PENDAHULUAN

A. JUDUL SKRIPSI

Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Seputar Eksploitasi Hutan di Indonesia

B. SUB JUDUL

Analisis Isi Penerapan Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Eksploitasi Hutan di Indonesia pada SKH Kompas April – Mei 2010

C. LATAR BELAKANG

Setiap tanggal 22 Mei, dunia memperingati hari biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Pada tahun 2010, PBB melalui UNEP (*United Nation of Environment Programme)* menetapkan tahun ini sebagai tahun biodiversitas internasional. Tujuan penetapan tahun biodiversitas ini adalah untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap pentingnya kelangsungan hidup spesies lain, flora dan fauna yang terancam punah dan dampaknya bagi lingkungan hidup.[1]

Tema yang digunakan pada tahun biodiversitas ini adalah “Keanekaragaman Hayati, Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan” (*Biodiversity*, *Development*

[1] Eka Puspasari, Harriska Farida Adiati, 12 Januari 2010. Viva News. Viva News. http://dunia.vivanews.com/news/read/120538-2010_tahun biodiversitas_internasional di akses tanggal 5 Mei 2010 pukul 19.38 WIB

and Poverty Alleviation)[2]. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam penting untuk pembangunan sebuah bangsa. Pembangunan dapat berupa pertumbuhan ekonomi, industri dan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Dari pembangunan tersebut pengentasan kemiskinan dapat terwujud apabila sumber daya alam dikelola dengan baik tanpa melupakan usaha untuk melestarikan lingkungan sebagai modal alam untuk terus membangun. Penetapan tahun 2010 sebagai tahun biodiversitas internasional bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dunia bahwa menjaga keanekaragaman hayati sangatlah penting disamping manfaatnya sebagai sumber daya alam bagi pembangunan.

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia berlimpah. Hasil laut dan hutan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara. Pada masa pemerintahan presiden Soeharto, Indonesia mendapatkan devisa dari industri kehutanan sebanyak 3 miliar US dolar, terbanyak kedua setelah sektor minyak bumi. Industri kehutanan (kayu *log, plywood* – kayu lapis, *pulp* dan kertas) mendatangkan devisa yang besar bagi Indonesia, belum termasuk sektor lain yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan seperti perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, coklat), tambang (batu bara, timah dan tembaga) dan sebagainya[3]. Berbagai manfaat ini mendorong aktifitas eksploitasi terhadap hutan yang terkadang tidak memenuhi kaidah pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan hutan yang berlebihan dapat merusak hutan tersebut dan untuk memulihkan kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Hutan indonesia

[2] *Convention on Biological Diversity* http://www.cbd.int/idb/2010/ di akses tanggal 29 Juni 2010 pukul 20.08 WIB

[3] Herman Hidayat. 2008. *Politik Lingkungan, Pengelolaan Hutan Masa orde Baru dan Reformasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal 26

merupakan hutan tropis yang hampir tidak mungkin untuk diperbaiki karena siklus regenerasi hutan tropis memakan waktu yang lama.[4]

Sisi dilematis dapat ditemui pada permasalahan tentang pengelolaan hutan sebagai sumber daya alam yang menjanjijkan. Di sisi lain menjaga keutuhan hutan jugalah penting untuk masa depan bumi. Kelangsungan hidup hutan terancam seiring aktivitas manusia yang perlahan-lahan merusak hutan secara masif. Bencana alam mengintip di balik hutan yang rusak. Bencana seperti banjir karena berkurangnya tutupan tanah oleh tumbuh-tumbuhan, tanah longsor akibat tidak ada akar yang mencengkram tanah, dan berkurangnya debit air bersih akibat tidak adanya akar pohon untuk menyimpan air merupakan dampak dari berkurangnya pohon-pohon di hutan.[5]

Rusaknya lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, karena manusia merupakan bagian dari alam, oleh karena itu manusia tidak dapat memutuskan hubungannya dengan lingkungan hidup. Pada artikel Kompas, 27 April 2010 berjudul "*57.000 Ha Taman Nasional Dirambah*" disebutkan perambahan hutan mengancam kelangsungan hidup gajah liar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung dan Bengkulu. Perambahan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar yang memerlukan lahan untuk tanaman kebun seperti kopi, kakao atau coklat.[6] Gajah-gajah tersebut kehilangan habitat tempat tinggalnya, ruang gerak mereka semakin sempit dan pada akhirnya akan terjadi

[4] ibid, hal 86
[5] Ibid, hal 86
[6] Lihat *Kompas* : 27 April 2010.*57.000 ha Taman Nasional Dirambah*, hal 15.

konflik dengan manusia di kemudian hari ketika hutan tempat gajah-gajah liar tinggal semakin berkurang.

Rusaknya hutan tersebut tidak luput menjadi perhatian media massa. Peran media massa dalam kerusakan lingkungan tersebut cukup penting, pertama menginformasikan peristiwa yang terjadi kepada masyarakat luas dan media massa dapat mengedukasi masyarakat secara tidak langsung untuk menjaga lingkungan hidup dengan memberitakan dampak kerusakan lingkungan dan bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu media massa juga menjalankan fungsinya salah satunya adalah sebagai agen pengawasan atau *surveillance*.

Peran media massa dalam memberitakan mengenai kerusakan hutan perlu dioptimalkan untuk mengawal tindakan konkrit merehabilitasi hutan yang rusak serta pengawasan terhadap pemberian ijin[7] pemanfaatan hutan yang sarat dengan praktek korupsi[8]. Bila dilihat secara umum, kerusakan hutan di Indonesia diakibatkan oleh kebijakan pengelolaan hutan yang tidak berprinsip kelangsungan hidup, lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya sanksi keras bagi para pelanggar peraturan pengelolaan hutan. Masalah pokok faktor yang melatarbelakangi kerusakan hutan adalah salah pengelolaan dalam eksploitasi

[7] Dalam artikel yang ditulis Walhi di situs web resmi Walhi berjudul "Wajah Hutan Indonesia" menyebutkan permasalah utama dalam pemanfaatan hutan adalah Perpu yang membuka peluang pengusaha untuk kegiatan non kehutanan seperti pertambangan, infrastruktur telekomunikasi, jalan tol dan sebagainya yang berarti pemberian ijin bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas di hutan lindung. Pemberian ijin tersebut juga merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) yang harus diawasi. Sumber : http://www.walhi.or.id/en/campaign/forest-and-monoculture/56-jeda-tebang/95-wajah-hutan-indonesia diakses tanggal 1 Juli 2010 pukul 22.51 WIB

[8] Lihat *Kompas* 5 Mei 2010 *Pelanggaran Pertambangan. DPRD Kutai Bentuk Pansus Hak Angket.* Hal 23

hutan yang dikaitkan dengan kebijakan utama untuk sektor kehutanan, salah satunya adalah pemberian ijin pemanfaatan hutan yang relatif mudah dilakukan.

Studi tentang jurnalistik lingkungan pada dekade ini semakin menarik perhatian. Masalah lingkungan hidup menjadi semakin nyata akibat pembangunan, industri dan aktivitas manusia lainnya yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagian besar proyek dan dan persoalan di negara-negara sedang berkembang berasal dari hubungan mereka dengan berbagai fakta ilmiah dan lingkungan.[9] Media massa pada umumnya mempunyai peran untuk menginformasikan pada khayalak tentang pentingnya suatu peristiwa. Masalah perlindungan terhadap lingkungan adalah soal kesadaran.[10] Oleh sebab itu pemberitaan lingkungan perlu memperhatikan setiap detail berita agar masyarakat mengerti dan paham peristiwa apa yang sedang terjadi. Media massa terus menerus melakukan upaya berkesinambungan untuk memberi informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan ini.

Menurut Ana Nadya Abrar, " tidak semua berita yang menyangkut masalah lingkungan hidup dapat dimuat ke media massa karena biasanya mengandung konflik kepentingan dengan berbagai pihak yang terkait."[11] Berita-berita yang ditulis selalu tidak memuaskan salah satu pihak. Masalah realitas lingkungan hidup adalah berita yang kompleks yang melibatkan banyak kepentingan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu menurut Abrar lagi, penulisan berita tentang realitas lingkungan hidup di fokuskan kepada pemeliharaan lingkungan hidup.

[9] Albert L. Hester dan Wai Lan J.To,peny. 1997. *Pedoman Untuk Wartawan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 121
[10] Ibid,hal 121
[11] Ana Nadya Abrar. 1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gajah Mada University Perss. hal 8

"Jurnalisme lingkungan perlu memperhatikan masalah kesinambungan lingkungan hidup."[12] Eksploitasi hutan mengancam kelestarian hutan sehingga perlu adanya usaha untuk memelihara dan melestarikan hutan agar tetap lestari dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan jurnalisme lingkungan seperti yang dilakukan oleh Yunie Heneok, mahasiswa Universitas Kristen Petra yang meneliti tentang *media performance* dan obejektifitas media Kompas dalam pemberitaan masalah lingkungan hidup yaitu tentang isu pemanasan global. Yunie beranggapan bahwa masalah lingkungan kurang mendapatkan perhatian dari media massa. Oleh sebab itu Yunie tertarik untuk meneliti tentang isi pesan sebuah media terhadap masalah lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kompas menampilkan performa yang baik sedangkan objektifitasnya dinilai buruk.[13]

Vita Monica, mahasiswa Universitas Kristen Petra juga meneliti tentang masalah lingkungan hidup yakni pencemaran akibat berkembangnya industri di daerah Surabaya dan sekitarnya pada harian Kompas, Jawa Pos, Surabaya Post dan Surya. Media massa mempunyai fungsi untuk menginformasikan, edukasi dan sebagai mediator terhadap masalah lingkungan. Penelitian ini ingin melihat

[12] Ibid,hal 9

[13] Heneok, Yuni. 2008. *Berita Pemanasan Global pada Surat Kabar Kompas Tahun 2007*. Surabaya : Universitas Kristen Petra http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-51404116-9189-kompas_2007-abstract_toc.pdf diakses pada tanggal 1 Juli 2010 pukul 20.32 WIB

apakah media massa peduli terhadap masalah lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah media massa secara umum belum peduli terhadap masalah lingkungan.[14]

Kompas sebagai media nasional Indonesia mempunyai peran dalam menyampaikan informasi dan edukasi serta mempunyai peran sebagai agen pengawas (*watchdog*) terhadap lingkungan hidup khususnya tentang eksploitasi hutan di Indonesia. Sebagai media nasional, berita-berita yang dimuat di Kompas dibaca oleh masyarakat Indonesia sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Selain itu, Kompas berusaha menyatukan berbagai elemen pemberitaan yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan yang berkembang sebagai Indonesia mini.[15]

Kompas mempunyai rubrik lingkungan dan kesehatan yang membahas tentang masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya tentang kelestarian lingkungan dan kesehatan. Berita tentang eksploitasi hutan tidak hanya terdapat di dalam rubrik tersebut, tetapi tersebar di berbagai macam rubik tergantung dari sisi mana berita tersebut ditonjolkan. Misalnya dari sisi politik dan hukum, dari bisnis dan keuangan dan sebagainya. Berdasarkan peran media massa terhadap masalah lingkungan hidup khususnya kerusakan hutan membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana media massa khususnya Kompas dalam menerapkan jurnalisme lingkungan pada masalah eksploitasi hutan. Dalam kasus ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah jurnalisme lingkungan yang berpihak

[14] Vita Monica. 2006. *Studi Komparatif Pemberitaan Lingkungan di Jawa Timur pada harian Kompas, Jawa Pos, Surabaya Pos dan Surya*. Surabaya : Universitas Kristen Petra http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/ikom/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-51401061-8228-lingkungan-abstract_toc.pdf diakses pada tanggal 1 Juli 2010 pukul 20.43 WIB

[15] Sejarah, Organisasi dan Visi-Misi Kompas hal 3

pada kelestarian hutan tanpa meninggalkan sisi ekonomis hutan yakni sumber daya alam yang belimpah. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang memegang ijin ekslpoitasi baik hasil kayu, perkebunan maupun tambang dalam menjalankan aturan dalam memanfaatkan hutan. Pada aturan disebutkan untuk dilakukan reklamasi (untuk tambang) ataupun menanami kembali hutan setelah dipakai. Pengawasan juga dilakukan pada proses pemberian ijin pemanfaatan hutan kepada pengusaha. Sedangkan kasus pembalakan liar dan kejadian yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan yang lain, pengawasan dilakukan pada pemberian sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi penerapan jurnalisme lingkungan seputar pemberitaan eksploitasi hutan di Indonesia di SKH Kompas.

D. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerapan jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan seputar eksploitasi hutan di Indonesia?

E. TUJUAN MASALAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme lingkungan SKH Kompas pada pemberitaan seputar eksploitasi hutan di Indonesia.

F. KERANGKA TEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep jurnalisme lingkungan, pemberitaan dan konsep eksploitasi hutan sebagai landasan teoritik yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

F.1. Jurnalisme Lingkungan

Bumi menghadapi masalah kritis akibat perubahan iklim di berbagai tempat di dunia. Perubahan tersebut membawa berbagai dampak seperti bencana alam kekeringan, banjir, angin topan, selain itu juga menyebabkan gagal panen disejumlah wilayah akibat musim yang tidak jelas, berkembangnya berbagai macam penyakit akibat suhu bumi meningkat dan bencana lain yang mengintip. Perubahan iklim tersebut terjadi seiring aktifitas manusia modern yang tidak ramah lingkungan. Industri, polusi kendaraan, peternakan dan eksploitasi alam mendorong perubahan iklim semakin cepat. Segala peristiwa tersebut perlu diberitakan kepada khayalak agar waspada dan lebih peduli terhadap kelangsungan hidup bumi di masa mendatang.

Jurnalisme lingkungan adalah cara-cara jurnalistik yang mengedepankan masalah lingkungan hidup yang berpihak kepada kesinambungan lingkungan hidup. Artinya, penulisan berita diorientasikan kepada pemeliharaan lingkungan hidup sekarang agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang sama.[16]

Jurnalisme lingkungan mengedepankan masalah-masalah lingkungan dalam pemberitaannya. Lingkungan tempat tinggal manusia tidak luput dari kejahatan

[16] Ana Nadya Abrar. loc.cit. Hal 9

yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Seperti pertambangan di tengah hutan lindung, eksploitasi laut, reklamasi pantai, penebangan liar dan pemanfaatan hutan secara ilegal untuk dijadikan lahan perkebunan. Eksploitasi hutan di Indonesia sudah cukup mengancam, penerbitan ijin untuk mengelola hutan seperti ijin kuasa pertambangan (KP) – yang kini bernama IUP (Izin Usaha Pertambangan) berkembang pesat dalam waktu 5 tahun belakangan ini [17]. Hutan-hutan di Kalimantan-Sumatera habis dibabat untuk kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan menjaga kelestarian lingkungan. Pemberitaan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti dimensi politik, sosial, ekonomi dan ekologi.

Jurnalisme lingkungan adalah sebuah konsep jurnalistik yang memberitakan masalah lingkungan hidup dan solusinya. Berita-berita yang disajikan lebih mengutamakan masalah kesinambungan lingkungan hidup. Pers mempunyai peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut M. Soemadi Wonohito SH, pemimpin umum harian Kedaulatan Rakyat, peranan pers lingkungan tersebut adalah [18] :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

   Al Gore seperti yang dikutip oleh Risa Rademakers mengatakan

   > *" The media have a responsibility to inform and to educate, to tell us not only what is happening today but also why it is happening and what it will mean to us today and tomorrow*"[19]

[17]Lihat *Kompas* 5 Mei 2010 *Pelanggaran Pertambangan. DPRD Kutai Bentuk Pansus Hak Angket*. Hal 23

[18] Ana Nadya Abrar,op.cit.hal 66

[19] Lisa Rademakers. 2004. *Examining the Handbooks on Environmental Journalism : A Qualitative Document Analysis and Response to the Literature*. USA : University of South Florida.,hal 8

Pers menginformasikan kepada mayarakat pengetahuan terhadap lingkungan hidup dengan informasi yang akurat dan tepat. Dalam hal ini pers tidak saja menginformasikan tentang lingkungan yang baik dan sehat tetapi juga memberikan pendidikan secara tidak langsung yaitu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di masa mendatang. Inti dari pemberitaan lingkungan adalah masalah kesadaran yang perlu ditumbuhkan kepada masyarakat luas.[20]

Pemberitaan lingkungan hidup terkadang mengandung istilah yang tidak dimengerti oleh orang awam. Oleh sebab itu penjelasan tentang istilah tersebut menjadi penting. Informasi lingkungan hidup yang tidak memberikan gambaran yang jelas hanya akan membingungkan khayalak dan menjadi mubazir.[21]

Secara umum, agar informasi lingkungan hidup mudah dipahami oleh pembacanya, penyajian berita sebaiknya menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tidak banyak menggunakan grafik dan angka, mengungkapkan proses biologi, kimia dan fisika secara sederhana serta memberikan kutipan dialog yang hidup[22].

Staf Lembaga Pers Dr. Soetomo menyebutkan tiga misi yang diemban oleh pers dalam bidang lingkungan hidup, dua diantaranya adalah yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan dan yang kedua media massa sebagai wahana pendidikan bagi masyarakat dalam menyadari perannya dalam mengelola lingkungan.[23]

---

[20] Albert L. Hester dan Wai Lan J.To,peny. 1997. *Pedoman Untuk Wartawan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 121

[21] Atmakusumah,.et al. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal 26

[22] Ana Nadhya Abrar,loc.cit. hal 16

[23]Ibid, hal 22

2. Mengangkat isu kemungkinan adanya pencemaran serta bahayanya.

Pers berperan sebagai agen pengawas masalah lingkungan. Ketika sebuah lingkungan ternacam akibat eksploitasi manusia. Pers bersiaga dengan memberitakan masalah tersebut kepada masyarakat disertai dengan beragam informasi tentang dampak dan bahaya yang akan terjadi tentang kerusakan/pencemaran lingkungan tersebut. Sebelumnya dalam berita yang dijabarkan, sudut pemberitaan tentang masalah lingkungan perlu dijelaskan sehingga memudahkan untuk melihat masalah dengan lebih jelas. Dengan memberitakan isu tersebut, diharapkan akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Poin ketiga dari peran media massa yang dirumuskan oleh staf lembaga pers Dr. Soetomo yaitu pers mempunyai hak untuk mengontrol dan mengoreksi dalam masalah lingkungan hidup. Pada poin ini, kebijakan pemerintah, masyarakat dan sepak terjang pengusaha atau industri yang berhubungan dengan lingkungan menjadi sorotan pers untuk dikritik dan diberi masukan berupa solusi-solusi yang diperlukan.

3. Menjadi mediator di antara pihak-pihak yang terkait.

Pers menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terkait masalah lingkungan hidup. Pers menyatukan berbagai pendapat dari berbagai narasumber yang terlibat pada masalah tersebut. Misalnya LSM dengan pengusaha perkebunan sawit dan pemerintah daerah dalam menyikapi mengenai isu lingkungan tersebut. Peran mediator ini juga disebutkan oleh R. Gregory yaitu :

> *"…the news media help develop the public's perception of health or environmental risk by facilitating a two-way conversation between technical expert and the public and from the public to the scientist and government or industry decision makers"*[24]

Menurut Ana Nadya seperti yang disebutkan di awal, pemberitaan tentang masalah lingkungan hidup mengandung konflik dengan pihak-pihak yang terkait. Sepadan dengan itu, Lisa Rademakers mengatakan *"…environmental journalism has been a complex beat, encompassing more than just the environment often, politics, economics, and social issues play a part"*[25]. Banyaknya aktor yang terlibat pada masalah lingkungan, membuat peran pers sebagai mediator menjadi penting. Pers mengakomodasikan pendapat dan informasi yang perlu diketahui oleh publik ataupun oleh pengambil kebijakan. Oleh sebab itu wartawan lingkungan hidup dituntut untuk melakukan kinerja profesional dalam menyajikan berita lingkungan hidup[26]

Masalah lingkungan yang rumit melibatkan berbagai macam sudut pandang aktor yang terlibat. Pers tidak membangun berita sendirian, melainkan dengan ketelibatan pihak-pihak lain. Oleh sebab itu wartawan lingkungan perlu mengembangkan jaringan narasumber yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yaitu[27] :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat, baik lokal, nasional dan internasional yang pro lingkungan hidup. LSM mempunyai jaringan yang kuat berupa informasi dan akses ke masyarakat, advokasi, dan konfirmasi yang terpecaya dalam

[24] Lisa Rademakers,op.cit.hal 6
[25] Ibid, hal 15
[26] Kesimpulan penulis dari buku yang ditulis oleh Andi Noviriyanti. Andi menyebutkan kesalahan wartawan dalam memberitakan masalah lingkungan hidup yang terkadang bias dan menyesatkan dalam memberitakan masalah lingkungan hidup.
Andi Noviriyanti. 2006. *Obyektivitas Berita Lingkungan, Jurnalistik Berkelanjutan*. Riau : TAKAR Riau hal 7-26
[27] Atmakusumah, loc.cit. hal 58

menghadapi masalah lingkungan. Contoh LSM : Walhi, Greenpeace, WWF, dan sebagainya

2. Lembaga Pemerintahan baik di tingkat daerah seperti pemerintahan daerah setempat, tingkat nasional seperti departemen kehutanan maupun lembaga pemerintahan yang spesifik seperti Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal), LBN (Lembaga Biologi Nasional) dan sebagainya.
3. Lembaga Internasional seperti UNEP, World Bank, UNDP, UNESCO dan sebagainya yang turut berperan dalam masalah lingkungan.
4. Pusat Studi Lingkungan yang berada di perguruan tinggi. PSL ini berada di dalam lingkungan akademisi yang menyikapi masalah lingkungan hidup.

Selain itu, peneliti turut menambahkan poin ke-empat dan ke-lima dari narasumber yang perlu dikembangkan dalam meliput masalah lingkungan. Pada kasus eksploitasi hutan ini peran dari pelaku industri olahan kayu, pertambangan, pengusaha dan masyarakat serta aparat penegak hukum sekitar hutan juga mempunyai peranan penting dalam masalah lingkungan. Keterlibatan narasumber (aktor) dalam berita eksploitasi hutan menunjukkan ke arah mana berita tersebut ditujukan. Misalnya berita-berita eksploitasi banyak memuat aktor maka berita tersebut diangkat dari berbagai sudut pandang dan kemungkinan besar adalah berita yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Masing-masing aktor memiliki ciri khas tersendiri yang dapat merepresentasikan kepentingan mereka dalam sebuah peristiwa yang diberitakan. Penonjolan terhadap beberapa aktor maka kepentingan aktor tersebut diutamakan atau dianggap lebih penting. Misalnya LSM mempunyai ciri khas membela lingkungan hidup, Lembaga negara

mempunyai ciri khas mengatur tentang kebijakan kehutanan, Industri mempunyai ciri khas sebagai pengeksploitasi hutan dan sebagainya.

Berita lingkungan hidup sama saja dengan jenis berita lainnya. Yang membedakannya adalah realitas yang menjadi bahan bakunya. Menurut Lisa Rademakers dalam thesisnya mengatakan : "*Environmental issues can range from those associated with the natural environment of the earth or those assosiated with environmental threats to the health of living things*".[28] Bahan baku berita lingkungan hidup adalah realitas lingkungan hidup seperti polusi udara, penggundulan hutan, pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat dan sebagainya. "Yang membedakan persoalan lingkungan hidup dengan yang lain adalah juga kompleksitasnya karena melibatkan tidak hanya informasi teknis, tetapi juga ekonomi, politik dan pertimbangan sosial"[29]

Tabel 1.
Kategori Pemberitaan Lingkungan[30]

Detwiler (2004)	FON (1996)	Baskoro (2003)
1. Kualitas udara 2. Kualitas air 3. Populasi manusia 4. Zat addiktif 5. Sumber energi 6. Margasatwa dan kawasan konservasi 7. Pergerakan organisasi lingkungan 8. Fenomena alam alami	1. Udara bersih dan penghijauan 2. Perlindungan daerah liar 3. Pencemaran air 4. Erosi tanah dan ekologi agrikultur 5. Pencemaran udara an penanganannya 6. Pencemaran sampah padat 7. Masalah-malasah	1. Berkaitan dengan pencemaran lingkungan di darat, udara, dan laut 2. Berkaitan dengan pelestarian hutan, mahluk hidup dan keanekaragaman hayati 3. Berkaitan dengan aspek kebijakan (policy), undang-undang, peraturan dan hukum lingkungan.

[28] Lisa Rademakers, loc.cit.,hal 14-15
[29] Atmakusumah,op.cit.hal 38
[30] Andi Noviriyanti, loc.cit.,hal 61

	lingkungan 8. Iklim yang tidak normal dan bencana alam 9. Penggunaan produk dan teknologi yang ramah lingkungan 10. Organisasi lingkungan dan aktivitasnya	4.Berkaitan dengan masalah teknologi yang berhubungan dengan pelestarian/persoalan lingkungan.

Seorang jurnalis lingkungan hidup perlu berpihak kepada lingkungan hidup dimana kelestarian lingkungan hidup adalah tempat dimana manusia tinggal dan bergantung pada alam. Pemberitaan mengenai lingkungan hidup sebaiknya tuntas dan memasukkan solusi ke dalam pemberitaannya. Solusi yang tuntas ini bisa dilihat dari hubungan antara beberapa kegiatan manusia dengan bidang ekonomi, ekologi dan energi. Oleh sebab itu surat kabar merupakan media yang cocok untuk memuat berita lingkungan hidup, dimana surat kabar dapat memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk mengembangkan daya analisisnya.[31]

F.2 Berita

Berita menurut Paul De Massenner dalam buku *Here's The News* : *Unesco Associate* seperti yang dikutib oleh Haris Sumadiria[32] menyatakan, *news* atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Sedangkan menurut Charnley dan James M. Neal, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik masih baru dan harus secepatnya disampaikan

[31] Ana Nadya Abrar, loc.cit. hal 6
[32] Haris Sumadiria. 2006. *Jurnalistik Indonesia.* Bandung : Simbiosa Rekatam Media hal 64
[32] ibid

kepada khalayak.[33] Menurut Dean M. Lyle Spencer berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar masyarakat[34]. William C. Bleyer juga mendefinisikan arti dari berita, yaitu sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena menarik minat dan mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut.[35]

Sebuah berita lingkungan perlu disajikan secara lengkap yakni memenuhi aturan yaitu berita perlu ditulis dengan pertanyaan 5 W + 1 H yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan *what* (apa), *who* (siapa), *why* (kenapa), *where* (di mana), *when* (kapan), dan *how* (bagaimana). Selain itu, menurut Rahmad Ida seperti yang ditulis oleh Kriyantono menyebutkan soal akurasi dan faktualitas berita.[36] Akurasi atau akurat berita perlu disajikan secara akurat, penyajian data dan fakta-fakta ditulis secara benar dan tepat tanpa dikurangi ataupun ditambahkan. Juga meliputi kesesuaian judul yang merupakan aspek relevansi dengan isi, pencantuman waktu terjadinya sebuah peristiwa dan apabila diperlukan mencantumkan data pendukung atau kelengkapan informasi.[37]

Data pendukung dapat berupa pencantuman istilah ilmiah berikut dengan penjelasannya, data statistik, pencamtuman angka-analogi berupa perbandingan yang lebih mudah dipahami, foto dan sebagainya. Sedangkan faktual menyangkut

[33] ibid
[34] Ibid
[35] Andi Noviriyanti, loc.cit hal 58
[36] Kriyantono. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group hal 245
[37] Andi Noviriyati, hal 78-79

ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita[38]. L.R Baskoro dalam bukunya seperti yang dikutip oleh Andi Noviriyanti menyebutkan bahwa "jurnalistik lingkungan kurang memperhatikan kaedah penulisan berita baik, terutama pada *cover both sid*e, tidak memihak dan memasukkan opini ke dalan berita."[39]

Tidak semua kejadian layak untuk dijadikan berita. Agar dapat dijadikan berita, sebuah kejadian perlu memiliki nilai berita yaitu :

1. Significance (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap pembaca
2. Magnitude (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca
3. Timeliness (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi atau baru dikemukakan
4. Proximity (kedekatan) yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional.
5. Prominence (tenar) yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca seperti orang, benda atau tempat
6. Human interest (manusiawi) yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa[40]

Jika di dalam sebuah berita ditemukan lebih dari satu unsur nilai berita, maka akan semakin tinggi kelayakan beritanya. Pada berita lingkungan, nilai berita yang disajikan adalah *significance* dan *magnitude*, karena berita lingkungan khususnya berita tentang eksploitasi hutan jarang melibatkan orang terkenal (*prominence*), bila ada itupun termasuk biasa misalnya menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Sedangkan nilai *human interest* pada berita lingkungan khususnya berita tentang eksploitasi hutan jarang terjadi. Nilai berita *timeliness* tidak dimasukkan karena

[38] Rachmat Kriyantono, op.cit. hal 246-247
[39] Andi Noviriyanti, op.cit.hal 103
[40] Ashadi Siregar. 2002. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta : Kanisius hal 27-28

kebaruan berita tidak terdapat di dalam pemberitaan tentang eksploitasi hutan yang relatif terjadi dalam waktu yang lama, sehingga nilai berita yang dipakai adalah mengarah ke *significance*, mengarah ke *magnitude* dan mengarah ke dua nilai berita tersebut.

Sebuah berita dapat dirumuskan dari lingkup pemberitaannya. Menurut Ana Nadya Abrar, berita berdasarkan lingkup pemberitaan dibagi menjadi berita lokal, regional, nasional dan internasional. Sebuah berita dikatakan berita lokal jika peristiwa yang dilaporkan terjadi di sebuah kabupaten dan akibatnya hanya dirasakan di daerah itu, sedangkan berita regional terjadi misalnya di satu provinsi dan dapat dirasakan di provinsi lainnya. Berita nasional adalah peristiwa yang terjadi di suatu daerah namun dapat dirasakan seluruh negeri. Sedangkan berita internasional bila peristiwa di suatu negara dapat dirasakan oleh negara lainnya.[41] Berita lingkungan adalah berita yang memuat masalah lingkungan ke media massa. Pemuatan tersebut mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Selain melaporkan peristiwa yang penting yang sedang atau sudah terjadi, pemberitaan juga dapat "meramalkan" apa yang akan terjadi kemudian dengan melihat tanda-tanda sebelumnya. Hal ini terkait dengan fungsi kontrol dan koreksi dari pemberitaan lingkungan. Selain kritik dan dampak suatu peristiwa, berita lingkungan juga perlu mencamtumkan solusi dari peristiwa tersebut agar peristiwa tersebut tidak perlu terjadi lagi.

Berita-berita lingkungan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap realita lingkungan yang sedang terjadi. Kesadaran diperoleh

[41] Ana Nadhya Abrar, loc.cit. hal 6

dari informasi yang terkandung di dalam berita lingkungan. Informasi yang diberikan harus lengkap dan akurat. Lengkap dan akurat dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam berita misalnya kesesuaian judul, kelengkapan 5 W+1H, nilai berita dan kelengkapan informasi lainnya seperti istilah-istilah yang dijelaskan, data statistik dan penjelasan angka yang lebih mudah dipahami.

Fungsi mediasi dalam berita lingkungan bertujuan untuk menyatukan pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam masalah lingkungan hidup. Selain menyatukan, berita lingkungan juga mengakomodasi pendapat tertentu yang ingin didengar. Biasanya adalah pendapat yang pro lingkungan hidup. Lingkup pemberitaan yang diangkat dalam berita lingkungan untuk melihat sejauh mana masalah lingkungan lokal-regional diangkat menjadi isu nasional, fungsi mediasi juga membawa isu lokal menjadi menjadi perhatian nasioanal dan dapat diselesaikan sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi.

Fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas, kemudian dirangkum menjadi unit analisis untuk melihat bagaimana penerapan jurnalisme lingkungan pada pemberitaan seputar eksploitasi hutan. Dimensi yang pertama adalah fungsi informasi yang terdiri dari empat bagian yang mendukung yaitu keakuratan berita, kelengkapan 5W +1 H, kelengkapan informasi dan nilai berita. Dimensi yang kedua adalah fungsi mediasi yang terdiri dari lingkup pemberitaan, penyajian berita serta sumber berita. Dimensi yang ketiga adalah dimensi kontrol dan koreksi yang terdiri dari isi pemberitaan, penyebutan kritik, penyebutan solusi serta penyebutan dampak.

G. KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep akan memuat dimensi, unit analisis, kategorisasi dan sub kategorisasi. Masing-masing unit analisis akan digunakan untuk meneliti berita seputar eksploitasi hutan.

Unit Analisis

No.	Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub unit kategorisasi	Sub unit kategorisasi
1	Menginformasikan	Akurat	Kesesuaian judul dengan isi berita	Sesuai	
				Tidak sesuai	
		Kelengkapan 5 W + 1H	who	Ada	
				Tidak ada	
			why	Ada	
				Tidak ada	
			what	Ada	
				Tidak ada	
			when	Ada	
				Tidak ada	
			where	Ada	
				Tidak ada	
			how	Ada	
				Tidak ada	
		Kelengkapan informasi	istilah	Ada	
				Tidak ada	
			Definisi istilah	Ada	
				Tidak ada	
			Angka-analogi	Ada	
				Tidak ada	
			Data statistik	Ada	
				Tidak ada	

		Nilai berita	Lebih mengarah ke *significance*		
			Lebih mengarah ke *magnitude*		
			Mengarah ke dua nilai berita		
2	Mediasi	Lingkup pemberitaan	Lokal		
			Regional		
			Nasional		
		Penyajian berita	Satu sisi		
			Dua sisi		
			Multi sisi		
		Sumber berita	Lembaga negara	Pemerintahan pusat	ada
					Tidak ada
				Pemerintahan daerah	ada
					Tidak ada
				Lembaga milik negara	ada
					Tidak ada
			Lembaga Penegak Hukum		
			LSM lingkungan	Lokal	ada
					Tidak ada
				Nasional	ada
					Tidak ada
				internasional	
			Masyarakat		ada
					Tidak ada
			Pengusaha/ industri		ada
					Tidak

					ada
			Akademisi		ada
					Tidak ada
3	Kontrol dan Koreksi	Isi pemberitaan	Ekologi		
			Kebijakan peraturan kehutanan		
			Tindakan hukum		
			Kerusakan hutan		
		Penyebutan kritik	Aparat kehutanan	Ada	
				Tidak ada	
			Aparat penegak hukum	ada	
				Tidak ada	
			Pejabat pemerintah pusat/daerah	ada	
				Tidak ada	
			Perusahaan /industri	ada	
				Tidak ada	
			Kebijakan peraturan kehutanan	ada	
				Tidak ada	
			Masyarakat	ada	
				Tidak ada	
		Penyebutan solusi	Perbaikan kinerja aparat kehutanan	Ada	
				Tidak ada	
			Perbaikan fasilitas kehutanan	Ada	
				Tidak ada	
			Penegakan hukum bagi	Ada	

			pelanggar aturan kehutanan	Tidak ada	
			Penataan tata ruang hutan	ada	
				Tidak ada	
			Perbaikan kebijakan peraturan kehutanan	ada	
				Tidak ada	
		Penyebutan dampak	Dampak ekologis	ada	
				Tidak ada	
			Dampak ekonomis	ada	
				Tidak ada	
			Dampak sosial	ada	
				Tidak ada	

H. DEFINISI OPERASIONAL

Unit analisis dan kategorisasi di atas merupakan acuan dalam melakukan penelitian. Untuk melihat penerapan jurnalisme lingkungan yang terdapat pada pemberitaan seputar eksploitasi hutan penulis menggunakan beberapa konsep sebagai berikut :

1. **Informasi** :

a. Akurat : informasi yang diberitakan perlu memperhatikan keakuratan berita yang dapat dilihat dari :

Kesesuaian antara judul dengan isi berita yaitu apakah judul berita sesuai dengan isi berita yang diberitakan? Apakah judul berita menggambarkan isi berita? Dan apakah judul merupakan cuplikan kalimat dari isi berita? Oleh sebab itu terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- **Sesuai** : apabila judul sesuai dengan isi berita yakni mengambil kalimat dari isi berita.

Contoh :

Judul berita : Suaka Margasatwa Balai Raja Lenyap. Judul berita ini sesuai karena mengambil dari *lead* berita di bawahnya dengan sedikit pengurangan kata.

- **Tidak sesuai** : apabila judul tidak sesuai dengan isi berita yakni judul tidak mengambil kalimat dari isi berita.

  Contoh :

  Judul berita : Mafia Hutan Pun Harus Diberantas. Pada berita ini judul tidak mengambil kalimat dari isi berita sehingga dikatakan tidak sesuai.

b. Kelengkapan 5 W+1H yaitu sebuah berita dikatakan lengkap apabila mengandung unsur tersebut. Unsur-unsur 5 W+1 H yaitu :

- ***What*** : menggambarkan peristiwa apa yang sedang terjadi

  Contoh : Luas taman nasional berkurang 3.000 hektar

- ***Who*** : menggambarkan siapa yang melakukan atau terlibat dalam persitiwa tersebut.

  Contoh : masyarakat desa, orang rimba dan pemerintah daerah

- ***When*** : menggambarkan kapan peristiwa tersebut terjadi

  Contoh : selama kurang lebih 4 bulan terakhir

- ***Where*** : menggambarkan dimana peristiwa tersebut terjadi

  Contoh : peristiwa tersebut terjadi di Provinsi Jambi

- ***Why :*** menggambarkan kenapa peristiwa tersebut terjadi

  Contoh : Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pemetaan taman nasional

- ***How*** : menggambarkan bagaimana persitiwa tersebut terjadi.

Contoh : pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kawasan taman nasional. Luas taman tersebut berkurang 3000 hektar karena masyarakat menolak memasukkan kebun mereka dan merasa tidak dilibatkan dalam pemetaan.

Pada kategorisasi akan dijabarkan apakah berita tersebut mengandung semua unsur berita atau hanya sebagian saja.

c. Kelengkapan Informasi

Kelengkapan Informasi dijabarkan lagi menjadi :

c.1 Istilah : Istilah-istilah ilmiah, teknis, akronim serta jargon perlu dijelaskan. Selanjutnya pembagian kategori adalah sebagai berikut:

- Ada, apabila terdapat istilah ilmiah, teknis, singkatan atau jargon. Contoh : REDD, GCF, BLHD, biodiversitas

- Tidak ada, apabila tidak terdapat istilah ilmiah, teknis atau jargon

c.2 Definisi istilah : definisi istilah adalah penjabaran definisi dari istilah-istilah yang ditemukan pada berita

- Ada, apabila terdapat penjelasan mengenai istilah ilmiah, teknis atau jargon. Contoh : PHKA = Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

- Tidak ada, apabila terdapat penjelasan mengenai istilah ilmiah, teknis atau jargon.

c.3 Angka- analogi : adalah pencamtuman angka-angka terkadang menyulitkan pemahaman pembaca terhadap berita oleh sebab itu pencamtuman analogi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Contohnya setiap jam lahan hutan yang dirambah seluas 3 lapangan sepak bola dan sebagainya.

- Ada, apabila ada pencantuman angka-analogi

- Tidak ada, apabila tidak ada pencantuman angka-analogi

c.4 Data statistik berupa angka-angka hasil survey, tabel ataupun grafik yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan dari lembaga terkait yang berguna untuk menunjang berita. Contoh : angka-angka yang mengandung tanda %, sekian dari sekian, dan sebagainya.

- Ada, apabila terdapat data statistik

- Tidak ada, apabila tidak terdapat data statistik

d. nilai berita

Sebuah berita akan dipandang penting apabila mengandung unsur nilai berita penting. Karena peristiwa eksploitasi hutan merupakan sebuah peristiwa yang perlu diperhatikan khusus maka penulis lebih menekankan pada unsur nilai penting saja tanpa unsur menarik dari sebuah berita. Sebuah berita dikatakan penting apabila mengandung satu atau lebih dari 4 unsur nilai berita yaitu :

- *Significance* (penting), yaitu kejadian yang kemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Misalnya pembalakan liar di daerah hulu sungai mengancam masyarakat yang tinggal di bagian hilir berupa bencana banjir. Atau berkurangnya tutupan pohon akan berpengaruh terhadap iklim dunia. Unsur berita ini dapat juga berhubungan dengan dampak suatu peristiwa
- *Magnitude* (besar), yaitu kejadian yang menyangkut tentang jumlah yang besar, penyebutan angka dalam jumlah besar dan seberapa luas pengaruhnya. Misalnya penyebutan luas hutan yang dieksploitasi dalam hektar.

- *Timeliness* (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi atau baru dikemukakan
- *Proximity* (kedekatan) yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional.

Peristiwa eksploitasi hutan tidak terjadi dalam satu waktu melainkan terjadi proses yang berjalan sehingga unsur nilai berita *timeliness* tidak dimasukkan ke dalam unit analisis. Sedangkan unsur kedekatan atau *proximity* tidak dimasukkan karena eksploitasi hutan jarang melibatkan hubungan manusia dengan hutan secara intens dan tidak memiliki hubungan geografis ataupun emosi.

Selanjutnya pembagian kategori berdasarkan unsur nilai berita yang penting adalah :

- **Mengarah ke *significance***, apabila berita lebih mengarah ke unsur nilai berita *significance*
- **Mengarah ke *magnitude***, apabila berita lebih mengarah ke unsur nilai berita *magnitude*
- **Mengarah ke *siginificance* dan *magnitude***, apabila berita mengarah ke dua nilai berita tersebut.

2. Mediasi

Fungsi mediasi dapat dilihat dari sumber berita yang muncul pada sebuah berita, ruang lingkup berita dan penyajian berita.

a. Sumber berita adalah orang yang memberikan pendapat, atau pendapatnya dikutib wartawan dan dimasukkan ke dalam berita. Sumber berita terdiri dari :

a.1 Lembaga negara, dibagi menjadi tiga yaitu :

- Pemerintahan pusat : yaitu pemerintahan yang berkedudukan di Jakarta, misalnya kementrian kehutanan, kementrian lingkungan hidup, DPR, dan sebagainya.

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada pemerintah pusat yang memberikan pendapat pada berita.
- Pemerintahan daerah : yaitu pemerintahan yang berpusat di daerah-daerah. Misalnya DPRD, gubernur, walikota, dan sebagainya.

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada pemerintah daerah yang memberikan pendapat pada berita.
- Lembaga milik negara : yaitu lembaga-lembaga milik negara yang khusus menangani masalah-masalah tertentu dan bukan dalam skala pemerintahan. Misalnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, BAPPENAS dan sebagainya.

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada lembaga milik negara yang memberikan pendapat pada berita.

a.2 Lembaga penegak Hukum : yaitu lembaga yang bergerak di bidang hukum misalnya, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya.

Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada lembaga penegak hukum yang memberikan pendapat pada berita.

a.3 LSM : yaitu organisasi lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan. Dibagi menjadi 3 yaitu lokal, nasional dan internasional seperti WALHI dan *Greenpeace* yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu :

- LSM lokal : LSM yang mempunyai wilayah kerja lokal, misalnya WARSI yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi.

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada LSM lokal yang memberikan pendapat pada berita.
- LSM Nasional : LSM yang mempunyai wilayah kerja nasional, termasuk LSM nasional cabang daerah termasuk dalam LSM nasional. Misalnya WALHI.

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada LSM nasional yang memberikan pendapat pada berita.
- LSM internasional : LSM yang mempunyai wilayah kerja internasional. Walaupun mempunyai cabang kerja di Indonesia namun termasuk dalam LSM Internasional. Misalnya *greenpeace.*

  Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada LSM internasional yang memberikan pendapat pada berita.

a.4 Masyarakat : masyarakat sekitar hutan

Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada masyarakat yang memberikan pendapat pada berita.

a.5 Pengusaha/industri : adalah pelaku bisnis kehutanan atau tambang yang memanfaatkan lahan di hutan

Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada pengusaha/industri yang memberikan pendapat pada berita.

a.6 Akademisi : adalah orang-orang yang ahli di bidang tertentu ataupun mempunyai kedudukan akademis.

Kemudian dijabarkan menjadi : ada atau tidak ada akademisi yang memberikan pendapat pada berita.

b. Ruang lingkup Berita :

- **Lingkup pemberitaan lokal** : apabila sebuah berita terjadi di sebuah tempat yang hanya dirasakan di daerah itu saja atau paling tidak dirasakan di daerah lain tetapi dlam satu provinsi yang sama

  Contoh : berita tentang penebangan liar di sebuah kabupaten yang merugikan wilayah sekitar dalam satu provinsi.

- **Lingkup pemberitaan regional** : apabila berita terjadi di suatu provinsi dapat dirasakan provinsi lain.

  Contoh : Berita tentang penebangan liar yang merusak wilayah provinsi Jambi dan Riau.

- **Lingkup pemberitaan nasional** : apabila berita terjadi di suatu daerah yang dapat dirasakan secara nasional.

  Contoh : berita tentang penebangan liar yang terjadi di berbagai wilayah yang merusak hutan Indonesia.

c. Penyajian Berita :

- **Satu sisi** : apabila berita hanya mengakomodasi pendapat satu pihak saja yang saling mendukung.

  Contoh : pada kasus pemberian izin pemanfaatan hutan, pendapat yang diakomodasi hanya berasal dari LSM lingkungan yang menolak dengan tegas rencana pemberian izin pemanfaatan hutan di taman nasional terkait dengan pelestarian lingkungan.

- **Dua sisi** : apabila berita mengakomodasi pendapat dari kedua belah pihak yang bertentangan.

  Contoh : apabila pendapat yang diakomodasi adalah pendapat dari LSM yang menolak rencana tersebut dan pendapat dari pemerintah daerah yang membolehkan memberikan izin dengan pengawasan ketat untuk kemajuan daerah.
- **Multi sisi** : apabila berita mengakomodasi pendapat dari pihak ketiga atau lebih dari dua pendapat yang bertentangan.

  Contoh : apabila pendapat yang diakomodasi adalah pendapat dari LSM yang menolak rencana tersebut dan pendapat dari pemeriantah daerah yang membolehkan pemberian izin dengan pengawasan ketat untuk kemajuan daerah serta pendapat ketiga yang mengatakan tidak perlu untuk memberikan izin baru pemanfaatan hutan namun memaksimalkan lahan hutan yang sudah ada izinnya.

3. Kontrol dan koreksi

Fungsi kontrol dan koreksi dapat dilihat dari isi pemberitaan, kritik dan solusi yang diberikan pada suatu peristiwa.

a. Isi pemberitaan : arah pemberitaan adalah point utama yang menjadi inti berita yang kemudian mengarahkan pemberitaan. Pemberitaan tentang eksploitasi hutan mengarah pada empat hal yaitu :

- **Ekologi** : arah pemberitaan mengarah ke kelestarian hutan dan tetap berjalannya fungsi hutan dan segala isinya. Hutan dipandang dari segi nilai

biologinya. Contoh : berita tentang taman nasional Gunung Leuser dan ekosistem yang ada di dalamnya.

- **Kebijakan peraturan kehutanan** : arah pemberitaan mengarah ke produk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kehutanan beserta himbauan atau ajakan untuk mematuhi kebijakan yang berlaku ataupun perbaikan dari kebijakan sebelumnya. Misalnya tentang pemberian ijin untuk pertambangan, perkebunan dan sebagainya. contoh : himbauan kepada Gubernur untuk menolak tambang emas di hutan karena tidak sesuai dengan surat dari DPRD.
- **Tindakan hukum** : arah pemberitaan mengarah ke tindakan hukum seperti himbauan untuk menegakkan hukum bagi para pelanggar kehutanan, proses penyelidikan yang sedang berlangsung dalam memproses pelanggaran kehutanan, dan pelaksanaan hukum bagi para pelanggar. Misalnya : Polisi dihimbau untuk menindak tegas para cukong emas. Polisi selidiki mafia hutan. Polisi sita faktur kayu palsu.
- **Kerusakan hutan** : arah pemberitaan mengarah ke pemberitaan yang berkaitan dengan kerusakan hutan yang terjadi. Misalnya karena alih fungsi hutan (hutan diubah fungsinya menjadi pertambangan, fasilitas umum, perkebunan, lahan pertanian, pemukiman dan sebagainya), perambahan liar dan penyalahgunaan ijin pemanfaatan lahan hutan.

b. Kritik : apabila menyampaikan kritik dari sebuah masalah. Misalnya mengkritik kinerja pemerintah daerah yang lambat dalam menangani masalah pelanggaran aturan kehutanan.

Kemudian dijabarkan dalam kategorisasi :

- **aparat kehutanan** : yaitu aparat yang bekerja pada dinas kehutanan

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk aparat kehutanan
- **aparat penegak hukum** : yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan sebagainya yang bekerja di bidang penegakan hukum

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk aparat penegak hukum

-**pejabat pemerintah pusat/daerah** yaitu : yaitu para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan yang mempunyai andil dalam pengambilan keputusan baik di pusat maupun di daerah.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk pejabat pemerintah pusat/daerah
- **Perusahaan / industri** : yaitu pemegang konsensi HPH atau yang mendapat untung dari memanfaatkan hutan.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk perusahaan / industri
- **Kebijakan peraturan kehutanan** : yaitu produk kebijakan yang dirasakan kurang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk kebijakan peraturan kehutanan
- **Masyarakat** : kritik disampaikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hutan. contoh para perambah, warga sekitar hutan, pengungsi dan sebagainya.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada kritik untuk masyarakat.

c. Solusi : apabila menyampaikan solusi dari sebuah masalah. Misalnya solusi dari kambuhnya pelaku pembalakan liar adalah pemberian sanksi tegas yang memiliki efek jera bagi pelaku.

Kemudian dijabarkan dalam kategorisasi :

- **perbaikan kinerja aparat kehutanan** : dalam mengatasi permasalahan yang timbul solusi yang diperlukan adalah memperbaiki kinerja aparat kehutanan. Misalnya meningkatkan pengawasan dalam pemberian ijin.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada solusi untuk kinerja aparat kehutanan.
- **Perbaikan fasilitas kehutanan** : fasilitas kehutanan yaitu hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan kehutanan yang memudahkan mobilisasi kayu secara legal. Misalnya pembangunan jalur angkut kayu legal.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada solusi untuk perbaikan fasilitas kehutanan
- **Penegakan hukum bagi pelanggar aturan kehutanan**, yaitu pemberian sanksi yang sepadan atau tegas kepada pelanggar aturan kehutanan. Misalnya sanksi tidak hanya denda namun juga sanksi pidana kurungan kepada para penebang liar.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada solusi untuk penegakan hukum bagi pelanggar aturan kehutanan
- **Penataan tata ruang hutan,** yaitu ide untuk menata hutan agar pemakaiannya maksimal dan tertata rapi tanpa ada yang mubazir.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada solusi untuk penataan tata ruang hutan.
- **Perbaikan kebijakan kehutanan**, yaitu solusi untuk memperbaiki produk kebijakan kehutanan agar bisa mewadahi segala kegiatan kehutanan dengan baik. Misalnya aturan tentang dana reboisasi harus diperjelas agar tidak ada salah paham dalam menjalankannya.

yang didefinisikan ada atau tidak ada solusi untuk perbaikan kebijakan kehutanan.

d. Dampak : apabila menyampaikan dampak yang terjadi dari suatu peristiwa. Misalnya menyampaikan dampak dari eksploitasi hutan di sekitar hulu sungai akan mengakibatkan banjir besar.

Kemudian dijabarkan dalam kategorisasi :

- **Dampak ekologis** : yaitu dampak yang mengancam kelestarian lingkungan hutan.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada dampak ekologis pada berita eksploitasi hutan.

- **Dampak ekonomis** : yaitu dampak yang mengancam ekonomi bangsa akibat kerusakan hutan.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada dampak ekonomis pada berita eksploitasi hutan.

- **Dampak sosial** : yaitu dampak yang mengancam hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Misalnya masyarakat desa sekitar hutan terganggu dengan pembangunan jalan di hutan.

  yang didefinisikan ada atau tidak ada dampak sosial pada berita eksploitasi hutan.

I. METODOLOGI PENELITIAN

I.1 Jenis dan Teknik Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Kedalaman data atau analisis tidak terlalu dipentingkan.[42] Penelitian penerapan jurnalisme lingkungan ini menghitung kemunculan atau frekuensi tiap unit analisis yang kemudian di generalisasikan. Analisis data didasarkan pada data kuantitatif yang diadapatkan dari *coding sheet.*

Peneliti menggunakan metode analisis isi dalam penelitian ini karena analisis isi menurut Berelson dan Kerlinger merupakan sebuah teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematik dan kuantitatif.[43] Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable)* dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.[44] Penelitian ini dilakukan secara obyektif, sistematik dan kuantitatif. Maksudnya adalah peneliti melihat masing-masing elemen penelitian sama kedudukannya tanpa memihak dan tidak melihat makna, kemudian secara sistematik yang berati mempunyai urutan dan rumus yang dilakukan, yaitu melakukan *pretest*, penelitian kemudian olah data secara kuantitatif.

Sebagai suatu tehnik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua tehnik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan “fakta”

[42] Rachmat Kriyantono, loc.cit. hal 75
[43] Haris Sumadiria,loc.cit. hal 230
[44] Klaus Krippendorff. 1993. *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.,hal 15

dan panduan praktis pelaksanaannya. Ia adalah sebuah alat. Secara umum, tehnik ini ingin melihat pesan komunikasi apa yang tergambar bukan makna yang dirasakan oleh periset, dengan memperhatikan pertanda yang identik dengan pertanda-pertanda lainnya. Analisis isi bersifat tersurat dan tidak memperhatikan makna yang tersembunyi, dalam melakukan penelitian makna yang dirasakan tidak terlalu diperhatikan tetapi lebih kepada tanda-tanda yang tampak .

Prinsip Analisis Isi[45] :
1. Prinsip sistematik
Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang di analisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.
2. Prinsip obyektif
Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orang-orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda.
3. Prinsip kuantitatif
mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif
4. Prinsip isi yang nyata
yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset.

Analisis isi mempunyai beberapa tujuan yang didefinisikan oleh Wimmer dan Dominick yang dikutip oleh Kriyantono yaitu analisis isi dapat menggambarkan isi komunikasi, karakteristik pesan, membandingkan isi media, memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di masyarakat, dan mengenai studi efek media massa [46]. Pada penelitian mengenai penerapan jurnalisme lingkungan seputar pemberitaan eksploitasi hutan, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah bagaimana media, dalam hal ini Kompas menggambarkan masalah lingkungan hidup dalam pemberitaan mereka atau isi komunikasinya. Apakah dalam rutinitas media, Kompas menerapkan prinsip jurnalisme lingkungan.

[45] Rachmat Kriyantono,loc.cit hal 231
[46] Ibid, hal 232-233

I.2 Objek Penelitian

Objek penelitian analisis ini adalah pemberitaan tentang eksploitasi hutan Indonesia di Surat Kabar Harian Kompas. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah segala kegiatan yang memanfaatkan hutan namun dilakukan secara berlebihan dan mengancam kelestarian hutan dan segala isinya. Pemilihan ini didasarkan pertimbangan praktis, akademis dan disengaja. Praktis maksudnya mudah diperoleh dan disengaja maksudnya dipilih karena faktor-faktor tertentu, yaitu dikarenakan SKH Kompas merupakan koran nasional dan memiliki oplah terbesar di Indonesia. Selain itu Kompas juga memenangkan perhargaan dari kementrian lingkungan hidup kategori surat kabar untuk berita foto lingkungan dan surat kabar peduli lingkungan. Kompas memenangkan dua kategori dari empat kategori. Kriteria penetapan anugerah ini adalah jumlah pemberitaan lingkungan, jenis tulisan, kualitas tulisan, konsistensi, dan frekuensinya.[47]

Berita mengenai eksploitasi hutan banyak terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan yang terkadang bersifat lokal. Pemilihan Kompas sebagai media yang diteliti bertujuan ingin melihat bagaimana Kompas sebagai media nasional terbesar menjalankan prinsip jurnalisme lingkungan dalam memberitakan masalah eksploitasi hutan kepada masyarakat Indonesia secara umum agar lebih peduli terhadap masalah tersebut. Menurut Rubin dan Windahl Jika sebuah media semakin mudah diperoleh, semakin besar sifat membantunya dan semakin dapat diterima secara sosial dan kultural penggunaan sebuah media dan semakin

[47] http://oase.kompas.com/read/2009/08/10/15573596/kompas.raih.2.penghargaan.dari.kementerian.lingkungan.hidup diakses tanggal 10 Oktober pukul 11.00

mungkin pula media tersebut dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alternatif fungsi yang paling tepat.[48]

I.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh berita mengenai eksploitasi hutan di Indonesia pada surat kabar Kompas periode Januari 2010 sampai Desember 2010, sedangkan sampel penelitian adalah berita mengenai eksploitasi hutan edisi 1 April sampai 31 Mei 2010. Pemilihan bulan tersebut dikarenakan pada Bulan April tepatnya tanggal 22 April merupakan peringatan hari Bumi sedangkan pada bulan Mei tepatnya 22 Mei merupakan peringatan hari Biodiversitas. Selain itu, dari bulan Januari hingga Juni 2010, bulan April dan Mei memuat berita tentang eksploitasi hutan terbanyak. Berikut data yang diperoleh :

Tabel 2.

Berita Ekslpoitasi Hutan Januari-Juni 2010

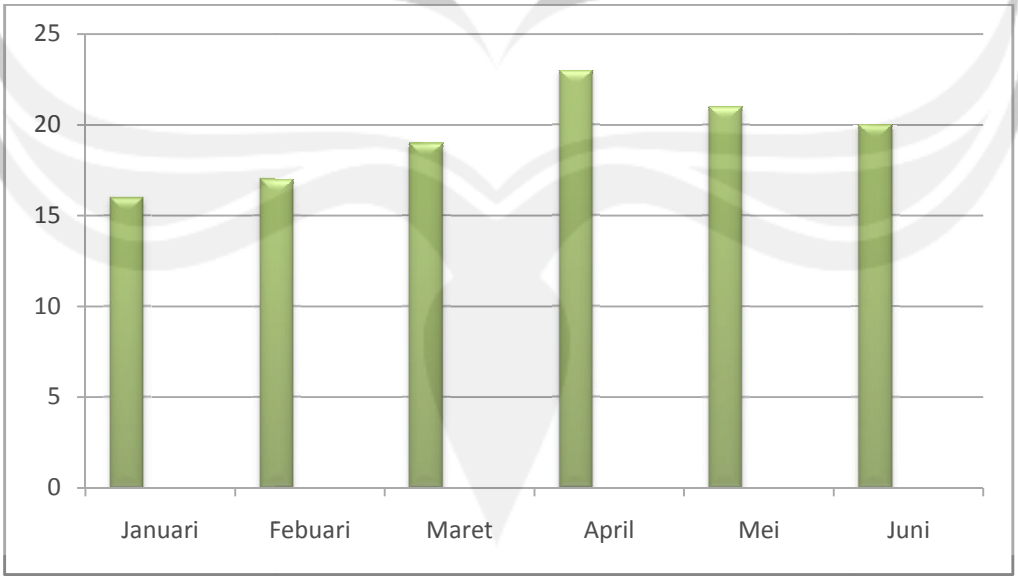

[48] Heru Puji Winarso.2005. *Sosiologi Komunikasi Masa*. Jakarta: Prestasi Pustaka.. hal 118

Sumber : Kompas

Bulan Januari : 16 berita, Febuari : 17 berita, Maret : 19 berita, April : 23 berita, Mei : 21 berita, Juni : 20 Berita.

Peneliti mengambil semua berita pada bulan April dan Mei, terkumpul sebanyak 44 berita. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 3
Distribusi Artikel Berita Eksploitasi Hutan

Halaman	Rubrik	Jumlah Berita
1	Berita Utama	1
2	Politik dan Hukum	2
12	Pendidikan dan Kebudayaan	1
12-13	Lingkungan dan kesehatan	6
14	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	1
17-18	Bisnis dan keuangan	5
22-24	Nusantara	27
Jumlah		44

Sumber : Kompas April sampai Mei 2010

Distribusi artikel eksploitasi hutan terbanyak di rubrik nusantara sebanyak 27 berita, sedangkan berita eksploitasi hutan yang menempati halaman utama hanya satu berita. Terbanyak kedua adalah rubrik lingkungan dan kesehatan yang memang mengkhususkan pada berita-berita lingkungan. rubrik Nusantara merupakan rubrik yang mencakup pemberitaan daerah-daerah. Sesuai dengan

hasil penelitian yang menyebutkan mayoritas pemberitaan merupakan pemberitaan lokal. Sedikitnya pemberitaan eksploitasi hutan yang berada di halaman utama menunjukkan berita eksploitasi hutan ini belum dianggap penting.

I.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan berita-berita yang ada di surat kabar[49]. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berita yang sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu berita eksploitasi hutan yang didapat dari SKH Kompas pada bulan April sampai Mei 2010. Berita-berita yang dikumpulkan ini termasuk data primer. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan lembar koding (*coding sheet*) yang dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan pada tahap alat ukur (unit analisis). Data juga dikumpulkan peneliti dengan cara mengumpulkan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai data atau informasi tambahan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

I.5 Pengkodingan

Pengkodingan dalam penelitian ini dipakai untuk melakukan analisis dan pengukuran isi berita mengenai seputar eksploitasi hutan di Indonesia di SKH Kompas periode April-Mei 2010. Pengkoding dalam penelitian ini dipilih 2 orang

[49] Kriyantono, loc.cit. hal 116

yang mempunyai minat dan kemampuan terhadap topik penelitian serta memiliki latar belakang ilmu komunikasi.

I.6 Reliabilitas

Uji reliabilitas perlu dilakukan untuk melihat konsistensi pengukuran data guna melihat apakah data yang dipakai dalam analisis isi dapat memenuhi harapan. Uji reliabilitas dlakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty yaitu :

$$CR = \frac{2\mathrm{M}}{\mathrm{N1} + \mathrm{N2}}$$

M : Jumlah pernyaatan yang disetujui oleh kedua pengkode

N1,N2 : Jumlah pernyataan yang dikode oleh pengkode pertama dan kedua

Sebelum melakukan penelitian terhadap keseluruhan berita, peneliti melakukan *pre-test* terlebih dahulu kepada *intercoder* untuk melihat sejauh mana *intercoder* paham terhadap unit analisis yang telah disusun yang kemudian berpengaruh terhadap uji reliabilitas. Peneliti melakukan tiga kali *pretest* untuk melihat unit analisis yang disusun telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pengujian yang pertama menunjukkan unit analisis yang disusun masih mengalami *overlapping* dan *pretest* yang kedua juga mengalami hal yang sama. *Pretest* yang ketiga menunjukkan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, disamping memenuhi nilai uji reliabilitas, unit analisis tidak mengalami

overlapping. Nilai uji reliabilitas yang ditetapkan Holsty adalah 0.6. kurang dari angka tersebut maka tidak reliabel.

I.7 Analisis Data

Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang sudah ditetapkan dalam kerangka teori melalui lembar *coding sheet* yang akan disusun ke dalam tabel untuk mempermudah dan mempercepat peneliti. Proses ini disebut dengan tabulasi frekuensi.